

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan atau yang lebih dikenal dengan konservasi penyu, merupakan Lembaga Konservasi yang berfungsi untuk memelihara, merawat dan mengembangbiakan habitat penyu yang sudah terancam punah, sekaligus tempat rekreasi dan pendidikan maupun penelitian yang terletak di desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

Konservasi penyu ini dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun menjual bagian tubuhnya itu dilarang. Menurut Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan sesuai dengan Visi Misi UPTD konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu terwujudnya ekosistem perairan daerah yang berkelanjutan dan ekonomis.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan konservasi penyu ini memberikan dampak positif dan negatif baik itu dalam tujuan pembangunan maupun keberlanjutan.

Peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan UPTD konservasi Provinsi Sumatera Barat termasuk kawasan yang masih terbilang cukup buruk untuk sebuah kawasan wisata, pendidikan dan tempat konservasi. Keadaan ini dapat terlihat dari aset yang diserahkan kabupaten kota kepada UPTD konservasi Provinsi Sumatera Barat yang sudah banyak mengalami kerusakan dan tidak dapat di manfaatkan lagi, sehingga nantinya akan mengganggu operasional konservasi dan pengawasan serta pelayanan UPTD konservasi.

Dilihat dari dimensi lingkungan pada kawasan konservasi saat ini bisa dikatakan memprihatinkan. Dimana tidak hanya bangunan-bangunan yang rusak dan terbengkalai saja melainkan juga keadaan dan kondisi konservasi juga memprihatinkan, banyak sekali tumpukan sampah di beberapa titik seperti di toilet, di sekitaran pagar pembatas kawasan objek wisata dan kondisi kolam yang juga di penuh sampah dan dedaunan. Selain itu untuk saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh pihak UPTD masih kurang maksimal, banyak sekali masyarakat yang mengeluh terhadap keadaan konservasi saat ini.

Namun dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dimensi ekonomi memberikan manfaat terhadap semua *stakeholder* dengan adil, dengan memberikan keuntungan terhadap perekonomian masyarakat setempat dengan menimbulkan multiplier effect terhadap masyarakat setempat seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan (membuka usaha), dan pelayanan social kepada masyarakat lokal, serta mengurangi kemiskinan yang berarti mengurangi jumlah pengangguran di daerah wisata konservasi.

Peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dimensi ekonomi memberikan dampak positif terhadap masyarakat lokal untuk

dapat membuka usaha di sekitar objek wisata konservasi seperti membukak usaha kecil-kecilan diantaranya memjual pop mie, makanan ringan, kelapa muda, jeruk nipis, nutrisari dll. Dan dengan berdirinya usaha tersebut menambah pendapatan bagi masyarakat lokal.

Selain itu dampak yang di rasakan dengan adanya objek wisata konservasi ini adalah menambah pendapatan terhadap dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang nantinya dana tersebut akan di setorkan ke badan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk saat ini pengunjung di UPTD konservasi menurun di akibatkan salah satunya adanya virus covid-19 membuat wisatawan sedikit yang mau mengunjungi objek wisata konservasi,

Maka peneliti menemukan bahwa dengan adanya virus corona ini sangat memberikan dampak negatif terhadap semua *stakeholder*. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wabah virus corona ini memberikan dampak yang begitu signifikan yang dapat merugikan semua pihak termasuk objek wisata konservasi

Namun dilihat pada pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dimensi sosial memberikan peluang yang adil dan merata bagi masyarakat di sekitar UPTD konservasi dengan bisa berjualan di sekitaran objek wisata konservasi sehingga memberikan dampak multiplier effect terhadap masyarakat lokal.

Selain itu pelayanan yang diberikan pihak UPTD konservasi terhadap wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara tidak memiliki perbedaan di antaranya pihak UPTD tidak membedakan harga tiket masuk ke kawasan objek wisata konservasi dengan tarif sebesar 3 ribu rupiah dan pelepasan tukik sebesar 5 ribu rupiah. Selain itu dengan ke datangan wisatawan ke objek wisata konservasi tidak mengubah perilaku masyarakat lokal dengan tetap ramah ke semua orang yang

memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pengunjung untuk datang ke objek wisata konservasi.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembangunan keberlanjutan pada kawasan ini masih terbilang belum optimal, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada seperti dimensi lingkungan yang terjadi akibat kegiatan wisata ini seperti erosi dan polusi yang dihasilkan, dan dampak negatif dari kegiatan pariwisata lainnya adalah terjadinya ketimpangan sumber daya yang dapat terjadi apabila ketersediaan sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh pelaku kegiatan wisata.

Selain itu dengan terjadinya pelimpahan tanggung jawab dari kota ke provinsi memberikan dampak positif dan negatif yang terjadi, dimana banyak perubahan yang di rasakan. dampak positif yang diberikannya yaitu berubahnya harga tiket masuk yang dulunya sebesar 5 ribu rupiah sekarang menjadi 3 ribu rupiah per orang. Dan dampak negatifnya yaitu menurunnya performance UPTD setelah di alihkan ke provinsi seperti tidak di kelola dengan baik. Selain itu banyak tumpukan sampah dan banyak bangunan-bangunan yang sudah tidak layak pakai dan rusak hal ini nantinya bisa membahayakan pengunjung yang datang berwisata jika kondisi UPTD terus seperti ini. Dampak yang akan terjadi yaitu akan mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan ke objek wisata konservasi

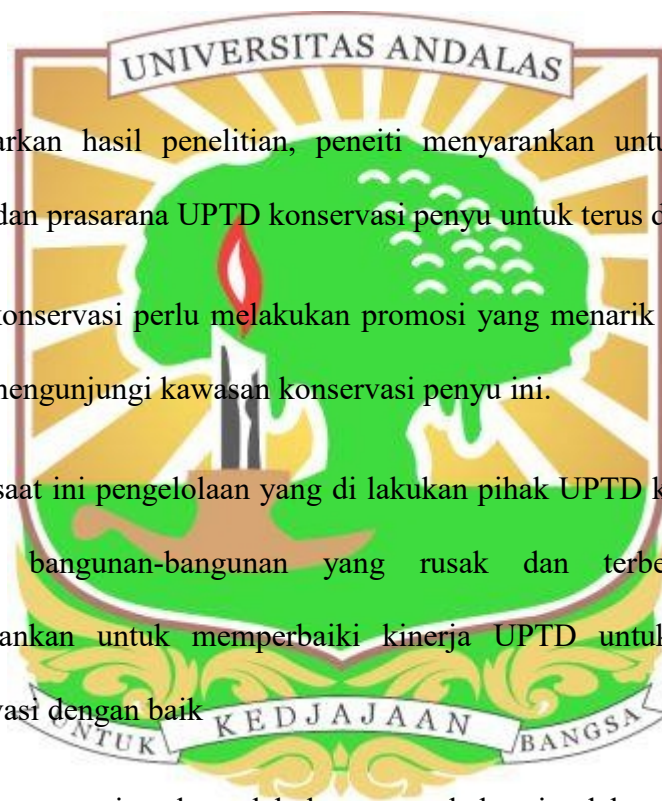
Peneliti menemukan bahwa dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di UPTD, permasalahan yang peneliti lihat dari kondisi petugas UPTD yang mengalami kekurangan personil. Seperti yang diketahui UPTD konservasi diberikan tugas untuk mengelola 7 kawasan konservasi perairan daerah yang luasnya 208.179,95 ha dan ditambah dengan pengembangan

konservasi jenis ikan. Namun sumber daya yang tersedia hanya 17 orang PNS dan 13 orang tenaga non PNS yang meliputi 2 petugas keamanan, 1 orang petugas kebersihan dan 1 sopir.

Maka tujuan keberlanjutan pada kawasan ini masih belum optimal, karena masih banyak permasalahan yang terjadi di antaranya dari lingkungan, infrastuktur dan SDM yang kurang sehingga terjadinya pengelolaan yang kurang baik terhadap UPTD konservasi

## 6.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan untuk pengembangan sarana dan prasarana UPTD konservasi penyu untuk terus ditingkatkan lagi.
2. Pihak konservasi perlu melakukan promosi yang menarik minat pengunjung untuk mengunjungi kawasan konservasi penyu ini.
3. Untuk saat ini pengelolaan yang dilakukan pihak UPTD kurang baik, masih banyak bangunan-bangunan yang rusak dan terbengkalai, peneliti menyarankan untuk memperbaiki kinerja UPTD untuk bisa mengelola konservasi dengan baik
4. Pihak konservasi perlu melakukan penambahan jumlah personil untuk lebih di tingkatkan lagi dalam performance UPTD konservasi
5. Pihak konservasi perlu melakukan penambahan jumlah penampungan sampah organik maupun non organik untuk meminimalisir sampah yang berserakan.



6. UPTD konservasi lebih memperhatikan lagi kawasan objek wisata ini, agar dapat terciptanya kawasan konservasi yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial.

